



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
Memuliakan Desa, Mempersatukan Indonesia

# Memperkuat PEMERINTAHAN, Memuliakan MANUSIA

*Sutero Eko*

# Masalah Abadi

## NEGARANISASI PEMERINTAHAN

Pemerintahan (pemerintah dan wakil rakyat) yang dibentuk oleh rakyat, disamakan dengan negara, atau menjadi bagian dari negara, yang hanya menyelenggarakan negara warisan kolonial (formalistik, hirarkhis, sentralistik dan birokratik)..

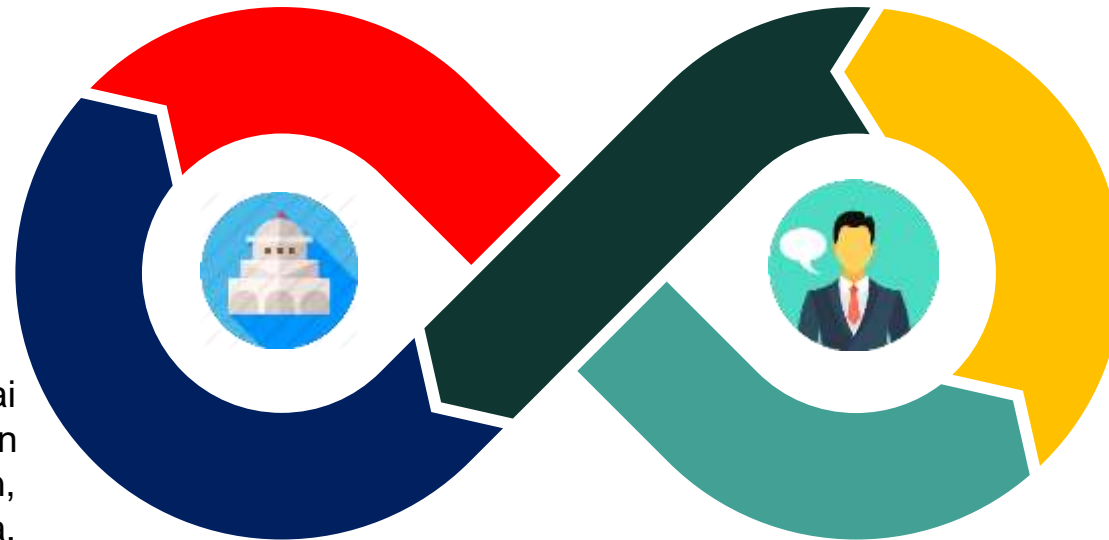
Pejabat pemerintah dinabobokan sebagai “pejabat negara” yang dilengkapi dengan protokoler, upacara, fasilitas, kebijakan, peraturan, uang, program oleh negara, sehingga hanya cukup tanda tangan dan berbicara di hadapan warga.

## GOVERNMENTALISASI NEGARA

Bukanlah pemerintah yang mengatur, tetapi malah negara.

Negara, atau tepatnya aparatus negara, adalah *the real government*.

Negara memiliki taktik berupa aturan dan proyek untuk memerintah, mengatur, mengurus, melayani, mewajibkan, membatasi, melarang warga.





# Masalah Dalam Distribusi



## **OLIGARKHIS**

Distribusi kekayaan berkerja secara oligarkhis, yakni dikuasai dan dibagi oleh segeintir elite



## **POPULISME**

Karena sulit lakukan reformasi yang menembus negara, pemimpin politik suka melakukan distribusi kue pembangunan secara populis. Ini menyenangkan rakyat tetapi tidak menolong rakyat



## **BIROKRATIS**

Distribusi pelayanan bekerja secara birokratis, yang sulit diakses oleh warga biasa.



## **TEKNOKRATIK**

Distribusi uang kepada daerah, desa, masyarakat dan rakyat bekerja secara teknokratik. Distribusi uang selalu menjadi alasan bagi negara untuk melakukan subordinasi dengan perangkat teknokratik

# DISTRIBUSI

Selain proteksi, tugas penting pemerintah adalah distribusi barang publik kepada warga yang dijalankan oleh negara.

# JEBAKAN PERENCANAAN

## REFORMASI

Pemerintah dan parlemen, yang berasal dari rakyat, seharusnya menyelenggarakan pemerintahan dengan politik (kekuasaan dan kewenangan) untuk melakukan reformasi yang mengatasi masalah fundamental.

01

REFORMASI

02

PERENCANAAN

## PERENCANAAN

Karena terjebak dalam negaranisasi pemerintahan dan governmentalisasi negara, maka pemerintah dan wakil rakyat lebih banyak melakukan inovasi dengan kerangka perencanaan.

03

TEKNOKRASI

## TEKNOKRASI

Perencanaan adalah rekayasa teknokratik anti-politik yang tidak sanggup mereformasi struktur masalah fundamental

# PROGRAM MEREDUKSI VISI

visi

01

Visi abstrak harus dielaborasi menjadi aksi konkret dan sederhana. Misalnya pemerintah menghadirkan negara melayani warga. Tetapi sederhana bukan berarti simplifikasi dan reduksi.

PERENCANAAN

02

Perencanaan merupakan taktik, kalkulasi dan perangkat bagi teknokrat (termasuk konsultan) untuk mereduksi visi besar dan sistem pemerintahan menjadi program yang pritiil-pritiil.

PROGRAM

03

Visi “martabat manusia” direduksi dan diteknikalisasi dengan program menjadi pembangunan manusia dan pengembangan sumberdaya manusia (SDM). Ingat konsep SDM itu menempatkan manusia hanya menjadi obyek dan alat produksi.

TEKNIKALISASI

04

Misi “ekonomi berkeadilan” akhirnya juga diteknikalisasi menjadi penanggulangan kemiskinan yang teknokratis.

# Mereduksi Pemerintahan & Demokrasi



Pemerintahan bukan dipandang sebagai entitas, subyek, sistem dan proses, melainkan direduksi menjadi bidang dan obyek yang kemudian dijadikan sebagai program.



Demokrasi tidak dipahami sebagai daulat rakyat dan hak-kewajiban warga, tetapi direduksi semata menjadi tatakelola yang disebut good governance (GG).



GG berurusan dengan transparansi dan akuntabilitas yang didukung dengan teknologi informasi, yang ujungnya adalah predikat WTP.



Salah kaprah pemerintahan dan hak-kewajiban warga tidak memperoleh sentuhan.





## James Madison, Presiden AS ke-4, berujar:

Jika semua manusia itu malaikat, maka tidak diperlukan pemerintahan”



Pemerintahan adalah jantung negara. Politik merupakan jantung pemerintahan

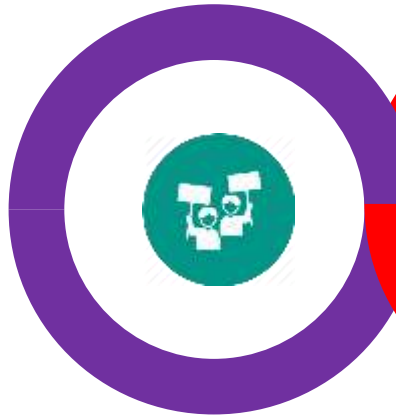


Politik membentuk pemerintahan, pemerintah melakukan perbuatan politik menyelenggarakan dan mengendalikan negara, termasuk membuat hukum, regulasi dan pelayanan publik.

# PEMERINTAHAN & NEGARA

## POLITIK

Kepentingan dan kedaulatan rakyat yang membentuk pemerintahan



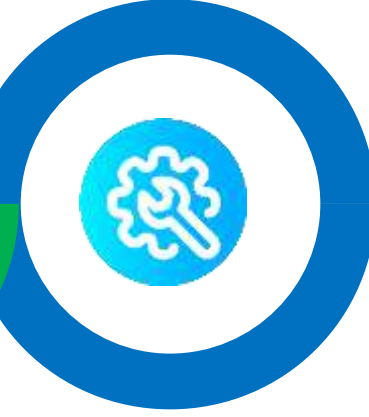
## HUKUM

Pemerintah dan wakil rakyat membuat hukum sebagai landasan pemerintahan, sekaligus memastikan hak-kewajiban warga



## TEKNIK

Penggunaan teknologi, cara dan metode untuk mendukung administrasi



## PEMERINTAHAN

Pemerintah dan wakil rakyat melakukan perbuatan politik untuk melahirkan kebijakan dan hukum, untuk menyelenggarakan negara

## ADMINISTRASI

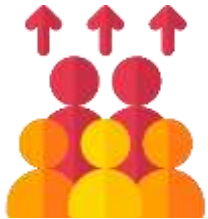
Birokrasi sebagai aparat negara melaksanakan administrasi untuk menjalankan hukum



# BERNEGARA

## POLITIK

Tindakan manusia meraih kepentingan, menggunakan akal sehat dan nilai. Ada ideologi, debat, kebijakan, sengketa, perang



## MANUSIA

Sebagai umat Tuhan, makhluk sosial, ekonomi, politik, budaya yang punya kepentingan, akal sehat dan nilai



## PEMERINTAH(AN)

sebagai institusi yang mengatur-mengurus politik, termasuk ambil keputusan politik & membuat hukum untuk memerintah negara

## HUKUM

- Keputusan pemerintahan
- Membatasi kekuasaan pemerintah
- Hak-kewajiban warga



## ADMINISTRASI

berupa birokrasi yang melaksanakan keputusan pemerintah dan pelayanan publik sesuai hukum

## TEKNIK

tindakan konkret untuk menjalankan administrasi, termasuk di sini bangun jalan, jembatan, gedung, transportasi, dll



# Siklus PROSES & SISTEM



## MANUSIA

Manusia semesta (makhluk Tuhan, makhluk sosial, budaya, ekonomi, biologis, politik) sebagai subyek yang memulai pembentukan masyarakat, bangsa, negara, rakyat, dll.



## RAKYAT

Demokrasi membuat manusia menjadi rakyat yang berdaulat dalam bentuk pemerintahan



## PEMERINTAH & PARLEMEN

Sebagai pemegang otoritas pemerintahan yang memerintah, mengatur, mengurus dan mengendalikan negara



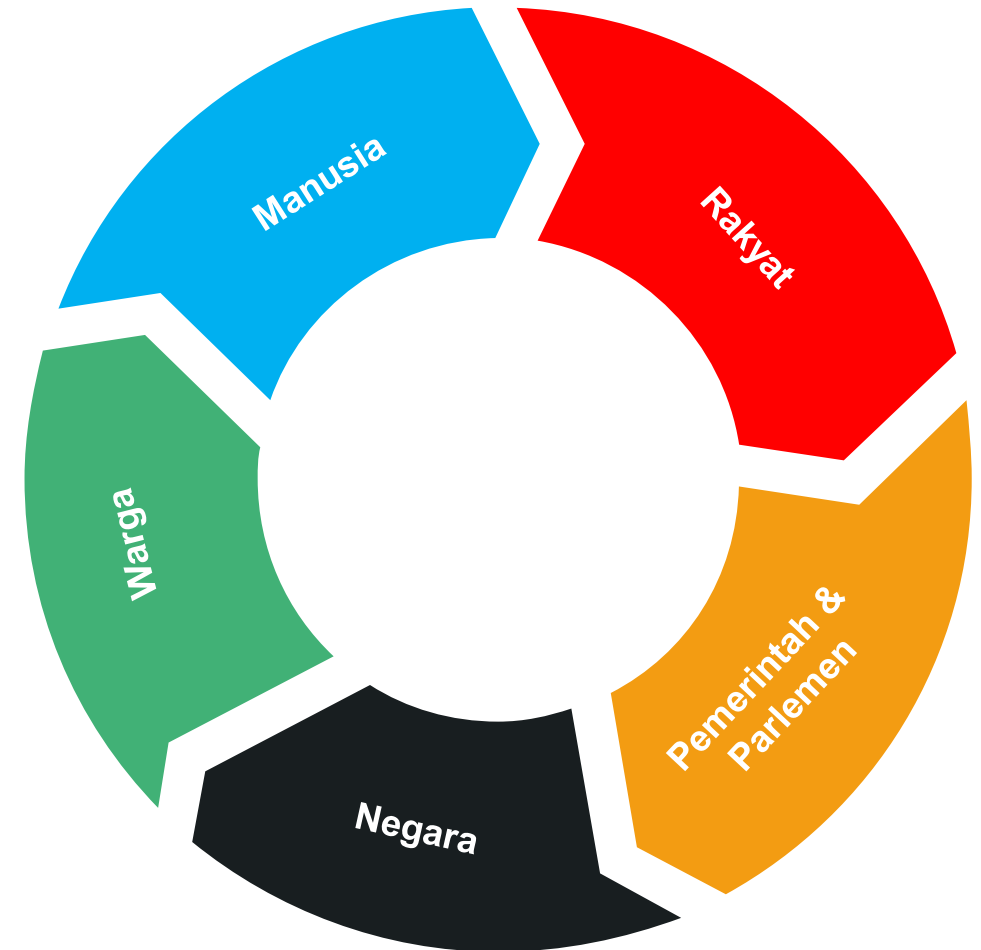
## NEGARA

Negara melindungi dan melayani warga dan masyarakat (persekutuan warga)



## WARGA

Pribadi utuh yang memiliki hak-kewajiban sebagai pemilik absah atas negara



# PERBUATAN PEMERINTAHAN & MEMERINTAH

## PROTEKSI

Pemerintah melindungi tanah air, bangsa, masyarakat, alam, warga, lingkungan, dll.

## INTERAKSI

Hubungan antara pemerintah dengan daerah, pelaku usaha, masyarakat, warga, desa, dll.

## DISTRIBUSI

Pembagian kekuasaan, kekayaan, uang, pelayanan publik

## REPRESENTASI

Rakyat melalui partai dan pemilu membentuk pemerintahan, yakni eksekutif dan legislatif

## REGULASI

Hukum untuk mengatur-mengurus representasi, interaksi, proteksi, dan distribusi.



# Pesan & Perintah Presiden Joko Widodo

Negara hadir dan melayani adalah dua kata kunci yang selalu disampaikan Presiden

Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota tidak perlu bikin program banyak. Cukup 3-4 program. Selebihnya adalah pelayanan.



# HAKEKAT

## SISTEM

Sistem pemerintahan hingga pelayanan lebih utama ketimbang perencanaan program. Program untuk hal teknis, bukan untuk manusia.

## PEMERINTAHAN

Pemerintahan yang berpusat pada pemerintah dan parlemen harus kuat dalam menggunakan kewenangan dalam memerintah negara untuk melayani warga



## KEWARGAAN

Pelayanan pemerintah merupakan hakekat proteksi dan distribusi, untuk memperkuat hak-kewajiban warga

## MARTABAT

Demokrasi yang berpusat pada kerakyatan dan kewargaan akan membentuk manusia bermartabat